

Belanja Daerah, Kekayaan Daerah, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah: Studi Empiris di Indonesia

Local Expenditures, Local Wealth, Financial Management Accountability, and Local Government Administration Performance: Empirical Studies in Indonesia

Muhtar

Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret

ABSTRACT

This study attempts to obtain empirical evidence regarding the determinants of local government administration performance in Indonesia using the local expenditures, local wealth, and financial management accountability factors. The research uses secondary data obtained from the authorized government agencies. Through purposive sampling selection, this study generates 1987 observations from 508 Indonesian local governments within 2015-2018 period, analyzed with multiple linear regression. The findings from our analysis demonstrate that the local government administration performance in Indonesia on average has reached a high level despite there still exists a number of local governments with medium and low performance. Multiple linear regression analysis generates empirical findings that operational expenditures, regional wealth, and financial management accountability exhibit a positive effect towards local government administration performance. However, capital expenditures does not show any significant effect. Further robustness testing also produced consistent findings for all independent variables. This study provides recommendations for realization of local governments to continuously improve the effectiveness of local expenditures, both operating expenditures and capital expenditures. The realization of capital expenditures must be followed by proper utilization of fixed assets to produce the expected outcomes. Local governments must also continue to maximize the local potential while maintaining good local financial accountability for the sake of improving local government administration performance.

Keywords: *Indonesia, local government administration performance, local expenditure, local wealth, financial management accountability*

ABSTRAK

Penelitian ini berupaya memperoleh bukti empiris terkait determinan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dari faktor belanja daerah, kekayaan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Data penelitian berjenis data sekunder yang diperoleh dari lembaga pemerintahan yang berwenang. Melalui seleksi *purposive sampling*, penelitian ini menghasilkan 1987 observasi dari 508 pemerintah daerah di Indonesia selama tahun 2015-2018 yang dianalisis dengan regresi linier berganda. Temuan yang didapat dari analisis penelitian menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia secara rata-rata telah mencapai level tinggi meskipun masih terdapat beberapa pemerintah daerah dengan kinerja sedang dan rendah. Analisis regresi

linier berganda menghasilkan temuan empiris bahwa belanja operasional, kekayaan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun, belanja modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Pengujian *robustness* lanjutan dengan untuk variabel independen penelitian juga menghasilkan temuan yang konsisten. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan efektivitas realisasi belanja daerah baik belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja modal harus diikuti dengan pemanfaatan yang tepat untuk menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Pemerintah daerah juga harus senantiasa berupaya memanfaatkan potensi daerah seraya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tinggi.

Kata kunci: Indonesia, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, belanja daerah, kekayaan daerah, akuntabilitas pengelolaan keuangan

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengalami reformasi urusan bernegara yang sangat signifikan sejak pengunduran diri Presiden Soeharto pada peristiwa reformasi 1998 (McLeod & Harun, 2014). Sebagai hasilnya, kebijakan desentralisasi dilaksanakan melalui otonomi daerah (Harun et al., 2019). Pemerintah daerah diberikan berbagai kewenangan yang besar dalam mengelola urusan pemerintahan (Holzhacker et al., 2016) termasuk di dalamnya pengelolaan sumber daya. Hal ini bertujuan meningkatkan demokratisasi serta pembangunan daerah mengingat pemerintah daerah lebih tahu tentang potensi daerah masing-masing dan pengelolaan yang diperlukan (Sutiyo & Maharjan, 2017). Adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan urusan pemerintahan langsung ke daerah tersebut diharapkan pemerintah daerah dapat memiliki kinerja yang baik dalam memaksimalkan segala potensi yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat (Sujarwoto, 2012). Sebagai akibat dari otonomi daerah, tuntutan dan tekanan publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah semakin meningkat. Publik tentunya senantiasa memiliki tuntutan yang tinggi kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai tugas dan perannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

Kementerian Dalam Negeri juga menaruh perhatian yang besar terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2015, Kemendagri menetapkan target bahwa seluruh pemerintah daerah setidaknya harus mampu meraih predikat kinerja yang tinggi (Winarna et al., 2021). Namun, pelaksanaan otonomi daerah masih mengalami persoalan mengingat masih adanya pemerintah daerah yang dinilai masih belum mampu memenuhi harapan publik (Rochmansjah, 2019) khususnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, meskipun dengan segala pelimpahan wewenang serta meningkatnya tuntutan dan tekanan publik. Masih banyak keluhan dan ketidakpuasan dari masyarakat akibat kurang optimalnya kinerja yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam berbagai penyelenggaraan pelayanan publik (Sutaryo et al., 2022). Selain itu, beberapa pemerintah daerah juga tidak memenuhi target yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri yang mengharuskan bahwa semua pemerintah daerah kabupaten dan kota mampu mencapai kinerja tinggi (Winarna et al., 2021). Dengan demikian, fenomena

ini menjadi isu penting yang mendasari perlunya kajian lebih lanjut untuk mengkaji determinan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Indonesia.

Pemerintah daerah diberi kewenangan mengelola kekayaan daerah yang ada serta merealisasikan belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan (Saragih, 2022). Studi ini berupaya memperoleh bukti empiris terkait determinan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terdiri dari belanja daerah, kekayaan daerah, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan mempertimbangkan pentingnya faktor-faktor tersebut dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan faktor yang penting dalam pembangunan daerah (Wiryanawan & Otchia, 2022) sebagai perwujudan dari upaya dan komitmen pemerintah daerah yang realisasinya diharapkan menunjang jalannya fungsi dan urusan pemerintahan. Adapun kekayaan daerah merupakan perwujudan dari potensi daerah yang harus dikelola oleh pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat (Saragih, 2022). Selanjutnya, akuntabilitas pengelolaan keuangan menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan yang dipercayakan oleh masyarakat mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Pahala et al., 2016). Penelitian ini berkontribusi dalam mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui perolehan bukti empiris yang komprehensif terkait peranan ketiga variabel tersebut. Struktur penulisan makalah ini disajikan sebagai berikut: tinjauan pustaka; metodologi; temuan dan pembahasan; dan penutup.

Teori Keagenan dan Pemerintahan Daerah

Teori keagenan yang diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) memberikan pemahaman fundamental mengenai terjadinya suatu hubungan keagenan yang berujung pada masalah keagenan dan konflik keagenan. Suatu hubungan keagenan terbentuk ketika suatu pihak yang disebut sebagai prinsipal memberikan suatu kewenangan kepada pihak lain yang disebut agen untuk melaksanakan suatu kepentingan (Mäntysaari, 2010). Pemerintah daerah yang dijalankan oleh kepala daerah pada dasarnya adalah sebuah organisasi yang dipercaya oleh publik untuk menyelenggarakan fungsi dan urusan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat (Halim & Abdullah, 2006). Namun, masalah keagenan muncul ketika pemerintah daerah yang dipimpin oleh eksekutif tidak mampu menjalankan fungsinya dan memberikan kinerja yang diharapkan sesuai dengan kepentingan publik. Dalam praktiknya, para pejabat pemerintah daerah sebagai agen diasumsikan akan cenderung memaksimalkan dan memenuhi kepentingan mereka sendiri daripada kepentingan publik yang dipercayakan kepada mereka sehingga melakukan berbagai tindakan yang menyimpang seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Jensen & Meckling, 1976). Oleh karena itu, suatu mekanisme akuntabilitas diterapkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah selaku agen melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara semestinya. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memberikan kinerja yang diharapkan.

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kinerja merupakan salah satu aspek penting dari akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban suatu pihak atas apa yang telah dikerjakan kepada pihak lain yang memiliki kepentingan (Winarna et al., 2021). Pemerintah daerah wajib menyelenggarakan fungsi dan urusan pemerintahan seperti pendidikan, kesehatan, sosial, ketertiban umum, dst. dengan sumber daya yang dimiliki, maka proses penyelenggaraan tersebut harus dilaksanakan secara akuntabel (Pahala et al., 2016). Dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri menerapkan suatu mekanisme penilaian kinerja melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang diamanatkan undang-undang yang dinilai dari aspek input, proses, output, hasil, manfaat, hingga dampaknya (Martani & Wicaksono, 2017). Pengembangan Indeks Kinerja EKPPD menggambarkan capaian komprehensif pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan mulai dari kebijakan hingga implementasinya (Martani & Pramudya, 2017). Dengan demikian, pemerintah daerah dapat bertanggungjawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan serta menjadi pondasi dan acuan utama dalam pelayanan publik (Sari et al., 2017).

Belanja Daerah Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Belanja merupakan alokasi sumber daya keuangan daerah yang digunakan untuk menjalankan urusan pemerintahan dan memenuhi kepentingan publik serta mewujudkan pembangunan (Fattah & Muji, 2012). Dalam literatur sektor publik, belanja telah dipandang sebagai faktor yang krusial dalam pembangunan daerah melalui penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam bentuk pelayanan publik sebagaimana diamanatkan undang-undang (Lewis, 2017). Secara spesifik, belanja pemerintah daerah di Indonesia diklasifikasikan menjadi belanja operasional dan belanja modal. Belanja operasional merupakan komponen yang sangat penting untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah secara operasional seperti membayar gaji pegawai negeri dan membeli persediaan dan administrasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, belanja modal merupakan belanja anggaran yang harus dialokasikan untuk mendukung upaya pembangunan dengan menghasilkan aset tetap (Kuntari et al., 2019) sehingga realisasinya diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan fasilitas di pemerintah daerah (Muda & Naibaho, 2018).

Jumlah belanja yang lebih besar akan meningkatkan cakupan penyelenggaraan fungsi pemerintahan oleh pemerintah daerah dan mendukung tercapainya kualitas pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah yang lebih tinggi, baik belanja operasional dan belanja modal, diharapkan mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh. Penelitian Lewis (2017) menemukan implikasi positif dari belanja daerah terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Shafuda & De (2020) menyebutkan pentingnya peningkatan belanja pemerintah untuk mendukung pembangunan dalam jangka panjang. Selain itu, penelitian Saragih (2022) menemukan pengaruh

positif belanja modal daerah terhadap kualitas pembangunan manusia. Merujuk pada referensi yang tersedia di literatur, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{1a}: Belanja operasional berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

H_{1b}: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Kekayaan Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah tidak terlepas dari kekayaan daerah yang berkaitan dengan besarnya sumber daya yang dikuasai pemerintah daerah. Kekayaan suatu entitas dapat dilihat dari sudut pandang keuangan (Kusumawardani, 2012). Pandangan umum menerangkan bahwa kekayaan organisasi secara umum tercermin dari jumlah aset sehingga kekayaan daerah dapat tercermin dari total aset daerah (Saragih, 2022). Baltaci & Yilmaz (2006) berpendapat bahwa pemerintah daerah dengan kekayaan yang lebih besar memiliki keuntungan karena jumlah sumber daya dan transfer nilai yang lebih besar. Adanya sumber daya keuangan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang lebih baik dan dapat mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan demikian, kekayaan daerah diharapkan memberikan implikasi positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Sejalan dengan penjelasan di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari aspek akuntabilitas untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugasnya dengan baik (Ríos et al., 2016). Akuntabilitas pengelolaan keuangan merupakan faktor potensial dalam mewujudkan kinerja yang baik karena berkaitan dengan bagaimana pengelolaan keuangan dilakukan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan anggaran, realisasi pendapatan dan belanja, hingga pelaporan keuangan (Pahala et al., 2016). Pemerintah daerah yang akuntabel akan mampu melaksanakan penganggaran dengan baik (Juwono & Eckardt, 2010), khususnya untuk memenuhi kebutuhan publik melalui penyelenggaraan program dan kegiatan yang sesuai, serta melakukan realisasi anggaran dengan baik untuk menghasilkan *outcome* yang diharapkan (Sutaryo et al., 2020), salah satunya kinerja yang tinggi.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan juga erat kaitannya dengan fungsi akuntansi. Pemerintah daerah dengan akuntabilitas keuangan yang baik akan memiliki praktik akuntansi yang lebih baik sehingga proses akuntansi dan kualitas pelaporan keuangan akan lebih baik (Muhtar et al., 2020). Setiap tahunnya, pemerintah daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

sehingga pemerintah daerah lebih patuh terhadap regulasi perundang-undangan yang berlaku (Pamungkas et al., 2018). Pemerintah daerah harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelola serta mewujudkan hasil yang dicapai dari penggunaan dana tersebut. Sebagai perwujudan akuntabilitas, pemerintah daerah juga senantiasa diawasi untuk menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih berkualitas (Winarna et al., 2021). Dengan demikian, akuntabilitas pengelolaan keuangan diharapkan mampu mendukung pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tinggi. Merujuk pada referensi yang tersedia di literatur, hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

METODE

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model kausalitas melalui pengujian hipotesis untuk mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Sekaran & Bougie, 2013). Studi ini berupaya mengkaji pengaruh belanja daerah, kekayaan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia. Cakupan populasi penelitian adalah seluruh pemerintah daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia selama periode 2015-2018. Proses pemilihan sampel penelitian menggunakan metode *purposive sampling* dengan menyeleksi pemerintah daerah dengan ketentuan tertentu, antara lain: (a) Pemerintah daerah terdaftar di Kemendagri selama tahun 2015-2018; (b) Pemerintah daerah menerbitkan laporan keuangan yang diaudit oleh BPK; dan (c) Kemendagri melakukan asesmen atas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah pada periode pengamatan penelitian. Terkait dengan data penelitian, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang didapatkan dari lembaga pemerintahan yang berwenang yaitu Kemendagri dan BPK.

Variabel Penelitian

Variabel dependen yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang direpresentasikan dengan hasil asesmen EKPPD. Variabel independen terdiri dari belanja daerah yang direpresentasikan oleh belanja operasional dan belanja modal, kekayaan daerah yang diprosikan oleh total aset daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang diukur dengan menggunakan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Penelitian ini juga dilengkapi variabel kontrol yang terdiri dari kompleksitas pemerintah daerah dan jenis pemerintah daerah. Operasionalisasi variabel penelitian secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran	Sumber
Dependen		
Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah (EKPPD)	Skor hasil asesmen EKPPD oleh Kemendagri	Kemendagri
Independen		
Belanja operasional (OPEX)	Nilai logaritma natural dari realisasi belanja operasional daerah	LKPD <i>audited</i> yang diperoleh dari BPK
Belanja modal (CAPEX)	Nilai logaritma natural dari realisasi belanja modal daerah	LKPD <i>audited</i> yang diperoleh dari BPK
Kekayaan daerah (ASET)	Nilai logaritma natural dari total aset daerah	LKPD <i>audited</i> yang diperoleh dari BPK
Akuntabilitas pengelolaan keuangan	Opini BPK atas LKPD 5 = Wajar Tanpa Pengecualian 4 = Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas 3 = Wajar Dengan Pengecualian 2 = Tidak Wajar 1 = Tidak Memberikan Pendapat	LKPD <i>audited</i> yang diperoleh dari BPK
Kontrol		
Kompleksitas daerah (SKPD)	Jumlah SKPD	LKPD <i>audited</i> yang diperoleh dari BPK
Jenis pemerintah daerah (KABKOTA)	Variabel kategorial: 1 = Pemerintah Kota 0 = Pemerintah Kabupaten	Kemendagri

Analisis Data Penelitian

Proses analisis data penelitian didahului dengan analisis statistik deskriptif dan korelasi variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh belanja daerah, kekayaan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan sebagai variabel independen terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah selaku variabel dependen. Persamaan regresi data panel dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

$$EKPPD = a + b_1OPEX + b_2CAPEX + b_3ASET + b_4OPINI + b_5SKPD + b_6KABKOTA_{it} + e \dots (1)$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi terkait gambaran umum fenomena penelitian berdasarkan data yang ada melalui analisis univariat (Subagyo, 2012). Observasi penelitian berjumlah 1987 observasi yang berasal dari 508 pemerintah daerah selama tahun 2015-2018. Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata capaian skor

EKPPD oleh pemerintah daerah di Indonesia mencapai 2,899 yang telah termasuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian, pemerintah daerah di Indonesia secara rata-rata telah mampu mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang tinggi. Nilai maksimum mencapai adalah 3,716 yang termasuk dalam kategori sangat tinggi. Namun, masih terdapat beberapa pemerintah daerah dengan capaian kinerja yang rendah dengan nilai minimum 0,624. Rincian statistik deskriptif analisis disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
EKPPD	1987	2,899	0,419	0,624	3,716
OPEX	1987	27,418	1,002	23,386	29,392
CAPEX	1987	26,361	0,51	23,508	28,554
ASET	1987	28,459	0,662	25,495	34,529
OPINI	1987	4,315	1,113	1	5
SKPD	1987	51,947	20,968	2	209
KABKOTA	1987	0,183	0,387	0	1

Variabel belanja operasional daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar 27,418 dengan nilai aktual 818,1 miliar rupiah. Nilai maksimum sebesar 29,392 yang berarti realisasi belanja operasional terbesar mencapai 5,8 triliun rupiah. Nilai minimumnya sebesar 23,386 dengan nilai aktual 14,3 miliar rupiah. Terkait belanja modal, nilai mean yang diperoleh sebesar 26,361 sehingga nilai aktualnya sebesar 280,8 miliar rupiah. Dengan demikian, realisasi belanja daerah masih didominasi belanja operasional dibandingkan belanja modal. Realisasi belanja modal tertinggi mencapai 2,5 triliun merujuk nilai logaritma natural nya sebesar 28,554 sedangkan yang terendah adalah 16,1 miliar merujuk nilai logaritma natural nya sebesar 23,508. Adapun variabel kekayaan daerah diprosikan oleh total aset menunjukkan nilai rerata 28,459 sehingga nilai aktualnya adalah 2,2 triliun. Selanjutnya, peneliti melakukan analisis korelasi antar variabel penelitian dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. Korelasi Variabel

Variabel	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) EKPPD	1,000						
(2) OPEX	0,198	1,000					
(3) CAPEX	0,191	0,366	1,000				
(4) OPINI	0,431	0,146	0,176	1,000			
(5) ASET	0,300	0,402	0,683	0,220	1,000		
(6) SKPD	0,073	0,121	0,130	0,002	0,150	1,000	
(7) KABKOTA	0,178	0,012	-0,039	0,115	0,154	-0,121	1,000

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh belanja daerah, kekayaan daerah. Output analisis mengungkap bahwa realisasi belanja operasional, kekayaan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun realisasi belanja modal daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Terkait dengan variabel kontrol, kompleksitas daerah berpengaruh positif pada kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang berarti bahwa semakin banyak jumlah SKPD akan mendorong pada kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, observasi variabel jenis pemerintah daerah mengungkap bahwa pemerintah kota cenderung memiliki kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih tinggi dibanding pemerintah kabupaten yang ditunjukkan dengan koefisien variabel KABKOTA yang positif dan signifikan. Hasil pengujian hipotesis disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Dependen: EKPPD	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
OPEX	0,031	0,009	3,37	0,001	0,013	0,049	***
CAPEX	-0,024	0,023	-1,06	0,289	-0,069	0,02	
OPINI	0,141	0,008	18,48	0,000	0,126	0,156	***
ASET	0,117	0,018	6,43	0,000	0,081	0,152	***
SKPD	0,001	0,000	2,64	0,008	0,000	0,002	***
KABKOTA	0,12	0,022	5,43	0,000	0,077	0,164	***
Constant	-1,32	0,443	-2,98	0,003	-2,189	-0,451	***
<i>R-squared</i>		0,248	<i>Number of obs</i>		1987		
<i>F-test</i>		108,564	<i>Prob > F</i>		0,000		

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

Hasil pengujian variabel belanja daerah menghasilkan temuan pengaruh positif realisasi belanja operasional terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun, realisasi belanja modal tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Belanja operasional yang lebih besar akan menghasilkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih baik. Belanja operasional memang sangat penting untuk melaksanakan fungsi dan urusan pemerintahan secara umum seperti membayar gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemenuhan barang habis pakai yang dibutuhkan untuk administrasi. Belanja operasi yang tinggi dapat mendukung kepuasan kerja ASN, meningkatkan motivasi kerja serta komitmen yang lebih besar terhadap pekerjaannya (Robbins & Judge, 2009). Hal ini akan tercapai ketika ASN diberikan gaji yang layak

dan fasilitas pendukung yang lengkap untuk melakukan pekerjaannya. Dengan demikian, ASN akan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga berimplikasi positif pada kinerja penyelenggaraan pemerintah. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kepuasan kerja ASN memiliki dampak positif pada pemberian layanan publik (Christensen et al., 2017).

Sementara itu, belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Belanja modal memang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap yang penting untuk penyelenggaraan fungsi pemerintahan (Muda & Naibaho, 2018). Namun, belanja modal di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan sehingga output yang dihasilkan belum memenuhi ekspektasi. Pemanfaatan aset tetap daerah juga belum optimal (Bukit, 2020) sehingga pengadaan aset tetap daerah belum dimanfaatkan dengan semestinya untuk menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Selain itu, Indonesia masih mengalami kesenjangan antar daerah dalam hal infrastruktur yang merupakan bentuk kurangnya realisasi belanja modal di sebagian daerah yang masih tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah di Indonesia direkomendasikan agar senantiasa meningkatkan realisasi belanja modal (Kuntari et al., 2019), khususnya untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang memadai dalam rangka mendorong penyelenggaraan fungsi pemerintahan khususnya di daerah yang relatif masih tertinggal.

Kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Hasil tersebut sesuai dengan hipotesis penelitian yang dirumuskan sebelumnya. Sebagaimana disampaikan oleh Baltaci & Yilmaz (2006), pemerintah daerah dengan kekayaan yang lebih besar memiliki keuntungan karena jumlah sumber daya dan transfer nilai yang lebih besar. Tersedianya sumber daya keuangan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi pemerintahan yang lebih baik dan dapat mendukung pelaksanaan program-program pemerintah. Dengan demikian, pemerintah daerah akan mampu mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik.

Variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang akuntabel akan mampu melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola yang lebih baik dan pengendalian internal yang memadai (Wardhani et al., 2017) sehingga kepatuhan terhadap amanat undang-undang lebih terpenuhi, salah satunya dalam aspek kinerja (Winarna et al., 2021). Akuntabilitas pengelolaan keuangan juga berimplikasi bahwa pemerintah daerah mampu melaksanakan anggaran dengan baik untuk memastikan bahwa pemerintah daerah melaksanakan tugas dan fungsinya (Ríos et al., 2016). Lebih lanjut, pemerintah daerah yang akuntabel juga mampu melaksanakan praktik akuntansi yang lebih baik dalam mewujudkan pelaporan keuangan yang andal (Muhtar et al., 2020) untuk memastikan bahwa dana dikelola secara semestinya untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah daerah akan dapat menjalankan fungsi dan urusannya dengan baik sehingga menciptakan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik.

Uji Robustness

Penelitian ini melakukan pengujian lanjutan berupa uji *robustness* dengan analisis regresi logistik. Pemerintah daerah dengan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah di atas rata-rata nasional akan diberikan nilai 1 sedangkan pemerintah daerah dengan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah di bawah rata-rata nasional akan diberikan nilai 0. Hasil analisis regresi logistik menunjukkan hasil yang konsisten. Temuan penelitian yang dihasilkan menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan belanja operasional, kekayaan daerah, serta akuntabilitas yang lebih tinggi cenderung mampu mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah di atas rata-rata nasional. Selain itu, realisasi belanja modal konsisten menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil uji *robustness* dengan analisis regresi logistik disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji *Robustness* dengan Analisis Regresi Logistik

Dependen: EKPPD_D	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
OPEX	0,279	0,153	1,82	0,068	-0,021	0,578	*
CAPEX	0,246	0,154	1,59	0,111	-0,056	0,549	
ASET	0,582	0,153	3,81	0,000	0,283	0,881	***
OPINI	0,517	0,048	10,81	0,000	0,424	0,611	***
SKPD	0,003	0,003	1,15	0,249	-0,002	0,008	
KABKOTA	0,834	0,153	5,47	0,000	0,535	1,133	***
Constant	-32,651	3,409	-9,58	0,000	-39,332	-25,969	***
<i>Pseudo r-squared</i>		0,140	<i>Number of obs</i>		1987		
<i>Chi-square</i>		369,563	<i>Prob > chi-squared</i>		0,000		

*** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji determinan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dari faktor belanja daerah, kekayaan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini mengungkap bahwa capaian rata-rata kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia telah ada pada level tinggi meskipun masih terdapat beberapa pemerintah daerah dengan kinerja sedang dan rendah. Hasil analisis menunjukkan bukti empiris yang bahwa realisasi belanja operasional, kekayaan daerah, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Adapun belanja modal tidak berpengaruh signifikan. Hasil pengujian *robustness* menunjukkan hasil yang konsisten untuk semua variabel. Berdasarkan temuan yang diperoleh, penelitian ini memberikan rekomendasi pada pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan efektivitas realisasi belanja daerah baik belanja operasi dan belanja modal. Realisasi belanja modal harus diikuti dengan pemanfaatan yang tepat

untuk menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Pemerintah daerah juga harus senantiasa berupaya memanfaatkan potensi daerah seraya menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baltaci, M., & Yilmaz, S. (2006). Keeping an eye on subnational governments: Internal control and audit at local levels. In *The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank* (pp. 1-31).
- Bukit, B. (2020). Utilization of Regional Property A Theoretical and Practical Approach in Determining the Method of Asset Utilization. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 5(2), 482-490.
- Christensen, R. K., Paarlberg, L., & Perry, J. L. (2017). Public Service Motivation Research: Lessons for Practice. *Public Administration Review*, 77(4), 529-542. <https://doi.org/10.1111/puar.12796>
- Fattah, S., & Muji, A. (2012). Local Government Expenditure Allocation toward Human Development Index at Jeneponto Regency, South Sulawesi, Indonesia. *IOSR Journal of Humanities and Social Science*, 5(6), 40-50. <https://doi.org/10.9790/0837-0564050>
- Halim, A., & Abdullah, S. (2006). Hubungan masalah keagenan di pemerintah daerah: Sebuah peluang penelitian anggaran dan akuntansi. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2(1), 53-64.
- Harun, H., Mir, M., Carter, D., & An, Y. (2019). Examining the unintended outcomes of NPM reforms in Indonesia. *Public Money and Management*, 39(2), 86-94. <https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1580892>
- Holzhacker, R. L., Wittek, R., & Woltjer, J. (2016). Decentralization and governance in Indonesia. In *Decentralization and Governance in Indonesia*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-22434-3>
- Jensen, N., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and capital structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Juwono, V., & Eckardt, S. (2010). Budget Accountability and Legislative Oversight in Transition/ : The Case of Post-Suharto Indonesia. In *Legislative Oversight and Budgeting: A World Perspective* (Issue 1, pp. 293-309). World Bank Institute.
- Kuntari, Y., Jatmiko, T., & Prabowo, W. (2019). Capital Expenditure of Local Government. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*, 23(1), 1-12. <https://www.researchgate.net/publication/335338150>
- Kusumawardani, M. (2012). Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 1(1), 27-35. <https://doi.org/10.15294/aa.v1i1.453>
- Lewis, B. D. (2017). Local government spending and service delivery in Indonesia: the perverse effects of substantial fiscal resources. *Regional Studies*, 51(11), 1695-1707. <https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1216957>

- Mäntysaari, P. (2010). The law of corporate finance: General principles and EU Law (Volume I). In *Springer Berlin Heidelberg*. <https://doi.org/10.1007/978-3-642-02750-5>
- Martani, D., & Pramudya, J. (2017). Measures and development output: relationship analysis of EKPPD and HDI. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(1), 12–23.
- Martani, D., & Wicaksono, P. T. (2017). Persistence of Indonesian local government performances: evaluation of EKPPD. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 17(2), 64–78.
- McLeod, R. H., & Harun, H. (2014). Public Sector Accounting Reform at Local Government Level in Indonesia. *Financial Accountability & Management*, 30(2), 267–4424.
- Muda, I., & Naibaho, R. (2018). Variables influencing allocation of capital expenditure in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 126(1), 1–8. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/126/1/012066>
- Muhtar, M., Payamta, P., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2020). Government accrual-based accounting standards implementation in Indonesia: The role of local government internal audit. *Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D: Faculty of Economics and Administration*, 28(3). <https://doi.org/10.46585/sp28031107>
- Pahala, I., Sudarma, M., Sutrisno, S., & Rosidi, R. (2016). Financial Accountability on Public Service Agency (BLU): Phenomenological study at the State University of Jakarta. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 5(2), 11–27.
- Pamungkas, B., Ibtida, R., & Avrian, C. (2018). Factors influencing audit opinion of the Indonesian municipal governments' financial statements. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–18. <https://doi.org/10.1080/23311975.2018.1540256>
- Ríos, A. M., Bastida, F., & Benito, B. (2016). Budget Transparency and Legislative Budgetary Oversight: An International Approach. *American Review of Public Administration*, 46(5), 546–568. <https://doi.org/10.1177/0275074014565020>
- Robbins, S. P., & Judge, T. (2009). *Organizational behavior*. London: Pearson.
- Rochmansjah, H. (2019). Impact Regional Autonomy in Improving Public Services Quality. *International Journal of Science and Society*, 1(2), 173–180. <http://ijsoc.goacademica.com>
- Saragih, J. (2022). Local Government Capital Expenditure, Internal Supervision, Wealth and Human Development: Evidence from Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 89–106. <https://doi.org/10.24815/JDAB.V9I1.23562>
- Sari, N., Ghozali, I., & Achmad, T. (2017). The Effect of Internal Audit and Internal Control System on Public Accountability/ : An Empirical Study. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 8(9), 157–166.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods for Business A Skill-Building Approach Sixth Edition*. John Wiley & Sons Ltd.
- Shafuda, C. P. P., & De, U. K. (2020). Government expenditure on human capital and growth in Namibia: a time series analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00196-3>

- Subagyo, P. (2012). Statistik Deskriptif, Edisi 5. In *Journal of the American Chemical Society* (Vol. 77, Issue 21, pp. 1-130).
- Sujarwoto, S. (2012). Political decentralization and local public services performance in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 2(3), 55. <https://doi.org/10.5296/jpag.v2i3.2156>
- Sutaryo, Naviantia, I. A., & Muhtar. (2020). Audit opinion on government financial report: Evidence from local governments in Indonesia. *International Journal of Economics and Management*, 14(1), 129-144.
- Sutaryo, S., Sahari, S. binti, Jakpar, S. bin, & Balia, S. S. bin. (2022). Internal Audit Function and Public Service Quality: Evidence From Indonesian Local Governments. *Public Administration Issues*, 0(5), 110-133. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-5-110-133>
- Sutiyo, S., & Maharjan, L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Springer.
- Wardhani, R., Rossieta, H., & Martani, D. (2017). Good governance and the impact of government spending on performance of local government in Indonesia. *International Journal of Public Sector Performance Management*, 3(1), 77-102. <https://doi.org/10.1504/IJPSPM.2017.082503>
- Winarna, J., Muhtar, M., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2021). Government Internal Control System and Local Government Administration Performance: Evidence from Indonesian Local Governments. *Public Finance Quarterly*, 66(2), 88-107. https://doi.org/10.35551/PFQ_2021_S_2_5
- Wiryanwan, B. A., & Otchia, C. (2022). The legacy of the reformasi: the role of local government spending on industrial development in a decentralized Indonesia. *Journal of Economic Structures*, 11(1), 1-19. <https://doi.org/10.1186/s40008-022-00262-y>